

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Kompas

## Pembatasan Angkutan Umum Tidak Bisa Drastis

JAKARTA, KOMPAS — Mulai Senin (23/3/2020), layanan angkutan umum di Jakarta, dari dan ke Jakarta, kembali dibatasi. Meski tidak sedrastis pada Senin pekan lalu, langkah itu dinilai tetap kurang pas karena pembatasan layanan transportasi umum seharusnya dilakukan bertahap sesuai dengan karakteristik angkutan, serta untuk mengedukasi pengguna.

Gagalnya penerapan pembatasan sosial tampak khususnya di moda kereta rel listrik atau KRL Jabodetabek yang tetap padat di setiap keretanya. Pada Senin pukul 15.00, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pun mengembalikan operasional KRL seperti semula, tidak lagi hingga pukul 20.00 saja tetapi kembali hingga pukul 24.00, berlaku untuk semua stasiun (80 stasiun) dan semua rute KRL.

Erni Sylviane Purba, VP Corporate Communications PT

KCI, mengatakan, mulai Selasa (24/3), layanan KRL juga kembali beroperasi mulai pukul 04.00 hingga tengah malam.

Penumpang KRL, Arie Widiyantio (35), warga Cakung, Jakarta Timur, mengatakan, imbauan dari pemerintah saja tidak cukup untuk menekan penyebaran virus Covid-19.

Menurut Arie, selama tidak ada aturan tegas dari pemerintah untuk mengatur pembatasan sosial, perusahaan tidak akan memberlakukan pembatasan jam kerja atau meminta karyawan bekerja di rumah. Hal ini karena perusahaan tidak mau rugi. "Nah, perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk melindungi warga dan pekerja yang masih beraktivitas. Termasuk perlindungan finansial, terutama untuk para pekerja harian atau buruh kontrak. Jika ini tidak dilakukan, upaya menekan penyebaran virus Covid-19 akan sulit," kata Arie

yang khawatir tertular virus Covid-19 karena berdesakan di dalam kereta.

Aditya Dwi Laksana, Ketua Forum Transportasi Perkotaan, Masyarakat Transportasi Indonesia, mengatakan, sebelum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan, sebaiknya memahami karakteristik setiap moda angkutan yang beroperasi.

Untuk MRT Jakarta dan LRT Jakarta, ia menilai kedua moda berbasis rel itu tidak ada masalah. Selain keduanya beroperasi di dalam kota, profil pengguna kedua moda transportasi ini adalah kelas menengah ke atas. Sehingga begitu ada pembatasan layanan, dengan mudah mereka mencari alternatif angkutan atau memakai kendaraan pribadinya.

Namun, bus Transjakarta dan KRL merupakan transportasi massal dengan jangkauan layanan yang luas, yang me-

layani dari pinggiran Jakarta ke tengah kota Jakarta dan sebaliknya. Pengguna kedua jenis angkutan umum itu lebih banyak kelas menengah ke bawah, bahkan juga dari masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut Aditya, seharusnya semua operator dan pemerintah duduk bersama. Apalagi dengan adanya imbauan bekerja dari rumah, selama sepekan lalu tren penurunan penumpang sudah terjadi. Dengan begitu operator angkutan bisa memberikan masukan kepada gubernur, cara pelaksanaan pembatasan transportasi dilakukan.

Syafrin Liputo, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, mengatakan, dengan pelayanan KRL yang dikembalikan seperti semula, jarak aman antarpenumpang tetap terjaga. "Prinsipnya kami mendukung karena masih banyak pekerja informal yang melakukan kegiatan," ujarnya. (HLN/GIO)